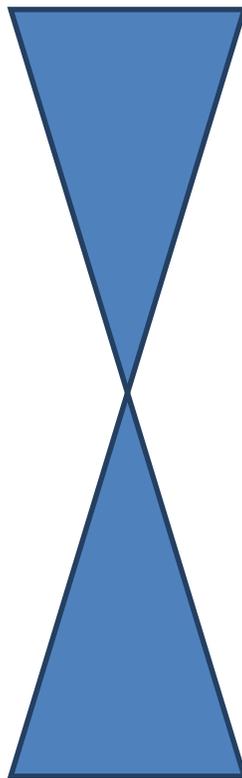




**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023**



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MANGGARAI
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselesainya penyusunan Laporan Kinerja Dinas komunikasi dan Informatika tahun 2023, Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Maka, sehubungan dengan itu laporan ini tidak hanya memuat berbagai capaian kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai pada tahun 2023 tetapi juga memuat beberapa target yang belum sepenuhnya tercapai. Beberapa target memang berhasil dicapai, namun dilain pihak ada target yang belum dapat dipenuhi karena berbagai faktor yang berada diluar kendali Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai.

Pencapaian kinerja tahun 2023 yang mencapai **91,73 % (kategori SANGAT TINGGI)** ini tidak terlepas dari kerja keras semua unsur dinas yang bahu membahu melaksanakan berbagai kegiatan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai dalam rangka memberikan kontribusi pada upaya mewujudkan tujuan meningkatkan sektor Komunikasi dan Informatika. Oleh karena itu, berbagai upaya yang baik perlu terus dibudayakan dan berbagai kendala yang menghalangi perlu terus dilakukan perbaikan. Dengan cara seperti ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai menjadi unit kerja yang secara terus menerus melakukan perbaikan dan berupaya memberikan kontribusi positif bagi upaya peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Ruteng, 23 Januari 2024


**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MANGGARAI,**

HERIBERTUS JELAMU, SH
PEMBINA
NIP. 19670316 199803 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Berdirinya Organisasi.....	1
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
1.4 Struktur Organisasi.....	9
1.5 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika.....	10
1.6 Sarana dan Prasarana	11
1.7 Masalah-masalah	12
1.8 Tujuan dan Manfaat LAKIP	13
1.9 Sistematika Penyajian	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
2.1 Perencanaan Strategis 2021-2026.....	15
2.2 Visi dan Misi	15
2.3 Tujuan dan Sasaran	16
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika.....	16
B. Analisis efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	24

C. Akuntabilitas Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika tahun anggaran 2023.....	26
BAB IV PENUTUP	30
A. Simpulan Kinerja Tahun 2023	30
B. Hambatan yang dihadapi dan Strategi Peningkatan Kinerja	30
C. Langkah Antisipatif yang akan diambil Tahun berikutnya	31

LAMPIRAN :

- I. *MATRIKS RENSTRA 2021-2026*
- II. *MATRIKS IKU 2021-2026*
- III. *RENCANA KINERJA TAHUN 2023*
- IV. *PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023*
- III. *PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama, maka telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Selanjutnya diperkuat dengan Peraturan Menpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap entitas Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya atas pelaksanaan APBN/APBD.

LAKIP ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika selama Tahun 2023. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2023 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian kinerja organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja ini akan digunakan sebagai umpan balik (*Feedback*) perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan (*continuing improvement*).

1.2 DASAR HUKUM BERDIRINYA ORGANISASI

- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- Peraturan Daerah Manggarai Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 09);

- Peraturan Bupati Manggarai Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai;

1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan tugas sebagai berikut:

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik.

Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, membina, mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang informasi dan komunikasi publik, teknologi informasi dan komunikasi, persandian dan statistik serta kesekretariatan;

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

- a. merumuskan perencanaan bidang informasi dan komunikasi publik, teknologi informasi dan komunikasi, persandian dan statistik;
- b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis bidang informasi dan komunikasi publik, teknologi informasi dan komunikasi, persandian dan statistik;
- c. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria bidang informasi dan komunikasi publik, teknologi informasi dan komunikasi, persandian dan statistik;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas informasi dan komunikasi publik, teknologi informasi dan komunikasi, persandian dan statistik;

- e. mengoordinasikan, mengendalikan dan membina pelaksanaan tugas kesekretariatan;
- f. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang informasi dan komunikasi publik, teknologi informasi dan komunikasi, persandian dan statistik;
- g. melaporkan pelaksanaan tugas bidang informasi dan komunikasi publik, teknologi informasi dan komunikasi, persandian dan statistik; dan
- h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi urusan perencanaan dan keuangan, urusan umum dan kepegawaian;

Dalam melaksanakan tugas , Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana operasional sekretariat;
- b. menyusun perencanaan program dan kegiatan dinas;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan urusan umum berkaitan dengan rumah tangga dan penatausahaan aset;
- d. mengoordinasikan penatausahaan keuangan;
- e. mengoordinasikan pengelolaan kepegawaian;
- f. menyusun dokumen evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas; dan
- g. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan bidang umum dan kepegawaian;
- b. melaksanakan penatausahaan surat menyurat;
- c. menyusun dan mengolah data inventarisasi barang milik Negara/Daerah;
- d. mengelola urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- e. mengelola urusan kepegawaian berkaitan dengan formasi pegawai, mutasi pegawai, pengembangan kompetensi, kesejahteraan pegawai dan disiplin pegawai; dan
- f. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan hubungan masyarakat dan kemitraan informasi dan komunikasi publik.

Dalam melaksanakan tugas , Bidang Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana kerja bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan hubungan masyarakat dan kemitraan informasi dan komunikasi publik;

- b. menyusun pedoman dan teknis pembinaan bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan hubungan masyarakat dan kemitraan informasi dan komunikasi publik;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan hubungan masyarakat dan kemitraan informasi dan komunikasi publik;
- d. mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan hubungan masyarakat dan kemitraan informasi dan komunikasi publik;
- e. melaporkan pelaksanaan tugas bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan hubungan masyarakat dan kemitraan informasi dan komunikasi publik; dan
- f. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

Bidang teknologi informasi dan komunikasi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang infrastruktur teknologi informasi, tata kelola *e-government* dan pembangunan aplikasi dan layanan informasi dan komunikasi elektronik.

Dalam melaksanakan tugas), Bidang teknologi informasi dan komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana kerja bidang infrastruktur teknologi informasi, tata kelola *e-government* dan pembangunan aplikasi dan layanan informasi dan komunikasi elektronik;
- b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis bidang infrastruktur teknologi informasi, tata kelola *e-government* dan pembangunan aplikasi dan layanan informasi dan komunikasi elektronik;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan bidang infrastruktur teknologi informasi, tata kelola *e-government* dan pembangunan aplikasi dan layanan informasi dan komunikasi elektronik;
- d. mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang infrastruktur teknologi informasi, tata kelola *e-government* dan pembangunan aplikasi dan layanan informasi dan komunikasi elektronik;
- e. melaporkan pelaksanaan tugas bidang infrastruktur teknologi informasi, tata kelola *e-government* dan pembangunan aplikasi dan layanan informasi dan komunikasi elektronik; dan
- f. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

Bidang Persandian dan Statistik mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang operasional pengamanan persandian, tata kelola persandian dan statistik.

(1) Dalam melaksanakan tugas), Bidang Persandian dan Statistik menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana kerja bidang operasional pengamanan persandian, tata kelola persandian dan statistik;

- b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis bidang operasional pengamanan persandian, tata kelola persandian dan statistik;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan bidang operasional pengamanan persandian, tata kelola persandian dan statistik;
- d. mengoordinasikan penyusunan Manggarai Dalam Angka/Daerah Dalam Angka;
- e. mengoordinasikan desiminasi data penyusunan statistik sektoral pemerintah daerah;
- f. mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang operasional pengamanan persandian, tata kelola persandian dan statistik;
- g. melaporkan pelaksanaan tugas bidang operasional pengamanan persandian, tata kelola persandian dan statistik;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang operasional pengamanan persandian, tata kelola persandian dan statistik;
- i. melaksanakan administrasi bidang operasional pengamanan persandian, tata kelola persandian dan statistik; dan
- j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat membawahi yaitu:
 - 1. Substansi Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, membawahi yaitu:
 - 1. Substansi Pengelolaan Informasi dan komunikasi Publik;
 - 2. Substansi Penyelenggaraan hubungan masyarakat
 - 3. Substansi kemitraan informasi dan komunikasi publik.
- d. Bidang Teknologi dan informatika :
 - 1. Substansi infrastruktur teknologi
 - 2. Substansi tata kelola e-government dan pembangunan aplikasi
 - 3. Substansi Layanan Informasi dan komunikasi Elektronik;
- e. Bidang Persandian dan Statistik, membawahi yaitu:
 - 1. Substansi Tata Kelola Persandian;
 - 2. Substansi Operasional Pengamanan Persandian; dan
 - 3. Substansi Statistik.

1.5 SUMBER DAYA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sumber Daya Aparatur Bidang Urusan :

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang yang diemban Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai didukung oleh sejumlah pegawai yang tersebar pada masing-masing bidang di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai. Adapun aparatur yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pada Bidang Sekretariat, Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, Bidang Persandian dan Statistik adalah sebagai berikut :

1. Jumlah PNS sebanyak = 21 orang
2. Jumlah Tenaga Harian Lepas sebanyak= 11 orang
3. Jumlah PNS berdasarkan Pangkat dan Ruang Gaji:
 - a. Golongan IV : 4 orang
 - b. Golongan III : 11 orang
 - c. Golongan II : 6 orang
 - d. Golongan I : - orang
4. Jumlah PNS berdasarkan Pendidikan:
 - a. S2 : 1 orang
 - b. S1 : 11 orang
 - c. D-3 : 3 orang
 - d. D-2 : 1 orang
 - e. SLTA : 5 orang
 - f. SLTP : - orang
5. Jumlah PNS berdasarkan Jabatan:
 - a. Eselon II : 1 orang
 - b. Eselon III-A : 1 orang
 - c. Eselon III-B : 3 orang
 - d. Eselon IV-A : 1 orang
 - e. Pejabat Fungsional : 7 orang
 - f. Staf : 8 orang
6. Jumlah PNS berdasarkan Penjenjangan/Diklat:
 - a. PIM II : 1 orang
 - b. PIM III : 2 orang

- c. PIM IV : 2 orang
- 7. Jumlah PNS menurut Jenis Kelamin:
 - a. Laki – laki sebanyak : 12 orang
 - b. Perempuan sebanyak : 9 orang
- 8. Jumlah Pegawai Non PNS:
 - a. Harian Lepas Laki – laki sebanyak : 6 orang
 - b. Harian Lepas Perempuan sebanyak : 5 orang

1.6 SARANA DAN PRASARANA

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai, maka tersedia sarana pendukung kegiatan sebagai berikut :

No.	Jenis	Jumlah	Kondisi			Ket.
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1.	Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika	1 unit	1 unit	-	-	Masih kurang ruangan PPID
2.	Kantor RSPD	1 Unit	1 unit	-	-	Fasilitas belum memadai-
3.	Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)	1 unit	1	-	1	Kondisi sering rusak,
4.	Kendaraan Roda 2 (dua)	1 unit	1	-	-	
5.	Geanset	1 unit	1	-	-	
6.	Kursi Kerja	15 buah	15	-	-	
7.	Laptop	6 Unit	4	-	-	Masih kurang 4 unit
8.	Printer	5 Unit	5	-	-	Kurang 2 unitt

9.	Komputer	4 Unit	4	-	-	Masih kurang 3 unit
----	----------	--------	---	---	---	---------------------

1.7 MASALAH-MASALAH

1. Belum adanya Diklat bagi pejabat yang menduduki jabatan di bidang Komunikasi dan Informatika dengan bidang Persandian.
2. Masih kurangnya saran prasarana dibidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik
3. Belum adanya jaringan terpusat yang menghubungkan setiap perangkat daerah
4. Pemenuhan variabel pada domain kebijakan internal SPBE masih belum optimal
5. Perlu peningkatan tata kelola dan ekosistem e-Government dalam rangka mewujudkan digitalisasi tata kelola pemerintahan
6. belum adanya data center (pusat data) yang terintegrasi
7. Masih banyaknya aplikasi yang belum terintegrasi
8. Masih banyak wilayah yang belum terjangkau layanan telekomunikasi
9. Belum maksimalnya Pemberdayaan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat)
10. Belum maksimalnya jangkauan siaran LPPL RSPD
11. Kurangnya dokumen data statistik sektoral daerah yang terintegrasi

TUJUAN DAN MANFAAT PENYUSUNAN LKIP

1. Tujuan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Manggarai ini disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan dalam mencapai Visi Dan Misi, serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*).

2. Manfaat

Sesuai dengan Permenpan 53/2014 tentang Petunjuk Teknis PK, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai ini diharapkan bermanfaat untuk :

1. Mendorong Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai untuk menyelenggarakan tugas Pokok dan Fungsi di bidang Komunikasi Dan Informatika secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Agar Dinas Komunikasi Dan Informatika dalam melaksanakan tugas dilaksanakan secara akuntabel, efisien, efektif dan reponsif terhadap kebutuhan masyarakat.

1.9 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada prinsipnya Dokumen LKIP bertujuan menginformasikan pencapaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai selama tahun 2023. Capaian kinerja Tahun 2023 tersebut diukur dan dinilai berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023 yang disusun pada awal tahun anggaran. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Manggarai tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Stratejik Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026. Indikator yang ditetapkan atas Rencana Kinerja tersebut menggambarkan satuan atau dimensi yang terukur dan operasional serta penilaian kinerja yang dilakukan atas dasar Rencana Kinerja bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Dengan demikian, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari Latar Belakang, Dasar Hukum Berdirinya Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi, Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika, Sarana dan Prasarana, Tujuan dan Manfaat Penyusunan LKIP serta Sistematika Penyajian.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Terdiri dari Perencanaan Strategis 2021-2026, Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Terdiri dari Capaian, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis dan Realisasi Keuangan.

BAB IV : PENUTUP.

Terdiri dari Simpulan Kinerja Tahun 2023, Hambatan yang Dihadapi dan Strategi Peningkatan Kinerja serta Langkah Antisipatif yang akan Diambil Tahun Berikutnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS 2021- 2026

Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai mencakup Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi Pencapaian Sasaran akan diuraikan pada bab ini. Sedangkan uraian sasaran dan target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2023 berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahun 2023 dan Penetapan Kinerja Tahun 2023. Berpedoman pada Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026, serta dengan melihat persoalan, tantangan dan keterbatasan yang dihadapi .

2.2 TUJUAN DAN SASARAN

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai
Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target kinerja/Tujuan Sasran pada tahun ke				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel	Meningkatnya Indeks SPBE	Indeks Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,1	2,4	2,6	2,8	3

2.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari bupati kepada pimpinan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja (PK) merupakan wujud nyata komitmen dari pimpinan Dinas Komunikasi dan Informatika bahwa ada kemauan dan kemampuan untuk menyelaraskan apa yang telah diperjanjikan dengan apa yang akan dilakukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Artinya bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berikut anggarannya masing-masing serta seluruh sumber daya yang digunakan akan diarahkan pada capaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati. Perjanjian Kinerja tersebut juga mencakup kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud sebagai impact dari program dan kegiatan-kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dalam konteks ini terkandung makna bahwa program dan kegiatan memang terencana dan berkesinambungan (*by design and sustainable*).

Sedangkan tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah (1) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja Aparatur; (2) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; (3) sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; (4) sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah dan (5) sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai tahun 2023 dapat dibaca pada table 2.2. berikut ini :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	
1	2	3		4
1	Optimalnya Integrasi Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	Nilai	2.40
		Persentase Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	Persen	100.00
		Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi	Persen	26.67
2	Meningkatnya Akses Informasi Publik	Persentase Kelompok Informasi Masyarakat yang menyebar Informasi dan Kebijakan Pemerintah Daerah	Persen	80.00
		Persentase Diseminasi dan Layanan Informasi Publik yang Dilaksanakan Sesuai dengan Strategi Komunikasi (STARKOM)	Persen	100.00
		Persentase OPD yang terhubung dengan Akses Internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	100.00
3	Optimalnya Layanan Persandian dan Kualitas Statistik Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan Sandi dalam Komunikasi	Persen	100.00
		Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan Data Statistik dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100.00
		Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan Data Statistik dalam melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persen	100.00
		Persentase Sistim Data Statistik yang terintegrasi	Persen	100.00

NO	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2,211,202,412
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	684,000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,863,579,716
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	86,709,300
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	236,519,396
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23,710,000
II	Program Informasi dan Komunikasi Publik	451,567,240
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	451,567,240
III	Program Aplikasi Informatika	86.940.000
	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	350.000
	Pengelolaan E-Government dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	86.590.000
IV	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	78,115,000
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	11,227,000
V	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Persandian	16,680,000
	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	16,680,000
	JUMLAH	2,777,616,652

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip penyelenggaraan pemerintahan. Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menginformasikan secara terbuka keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada para pihak yang berwenang memberi amanah. Laporan ini memberikan gambaran tingkat capaian masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan dalam upaya mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai.

A. CAPAIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Untuk kemudahan membaca tingkat keberhasilan dan/atau kegagalan capaian indikator sasaran, dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sebagai berikut:

Table 3.1
Skala Kategori Peringkat Kinerja

No.	Interval Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

(berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri no 86 tahun 2017)

Hasil Pengukuran Kinerja sesuai *form* Pengukuran Kinerja (terlampir), capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023 yang juga merupakan capaian kinerja tahun ke-2 periode RPJMD 2021-2026 adalah 91,73 %. Capaian ini termasuk kategori **sangat Tinggi**.

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun 2023

No.	Tahun	% Rata-rata Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran (Program Strategis)	Perbandingan antara Rata-rata Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran
1.	2022	91,73	92	Efisien

MISI IV : MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN MELAYANI

1. Capaian Sasaran Optimalnya Integrasi Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sasaran strategis satu (1) Dinas Komunikasi dan Informatika adalah “*Optimalnya Integrasi Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik*”

Sasaran ini diukur menggunakan beberapa indikator berikut:

Tabel 3.3
Capaian Indikator Sasaran
Optimalnya Integrasi Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENSTRA	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1.	1. Indeks SPBE	%	2.40	2.68	111,67
	2. Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100.00	200	200
	3. Persentase layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi	%	26.67	59,44	59,44
	RATA-RATA				123,70

Rata-rata capaian kinerja untuk sasaran strategi *Optimalnya Integrasi Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik* adalah mencapai 123,70 % dengan kategori sangat baik, yang terdiri dari 3 indikator sbb:

1. Indeks SPBE

Indeks SPBE merupakan suatu nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Penilaian penerapan SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui beberapa tahap kegiatan yakni penilaian mandiri, penilaian dokumen dan penilaian interviu melalui proses verifikasi, klasifikasi dan validasi dokumen pendukung.

Tingkat atau level tingkat kematangan predikat indeks SPBE:

4,2 – 5,0	= Memuaskan
3,4 – <4,2	= Sangat Baik
2,6 – <3,5	= Baik
1,8 - <2,6	= Cukup
<1,8	= Kurang

Target Indeks SPBE Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023 adalah 2,40 % sedangkan realisasi pada tahun 2023 sebesar 2,68 % dengan Kategori **BAIK**. Dari target dan realisasi yang dicapai, jika dipersenstasekan mencapai 111,67%. capaian ini mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebesar 0,93% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yang realisasinya sebesar 1,76% dengan kategori kurang.

Realisasi capaian tahun 2023 2,68 % jika dibandingkan dengan masa akhir periode hanya kurang 0,32%

Dibawah ini table perbandingan target dan realisasi Indeks SPBE tahun 2022, 2023 dan masa akhir periode

URAIAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		MASA AKHIR RPJMD
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET
INDEKS SPBE	2.10	1.76	2.40	2.68	3.00

Beberapa variabel yang menjadi faktor pendukung kenaikan index SPBE : tergambar pada table dibawah ini:

1. Pada Domain Kebijakan telah ditetapkan beberapa kebijakan terkait dengan SPBE
 2. Pemerintah kabupaten Manggarai telah memiliki dokumen arsitektur dan peta rencana SPBE yang memuat tentang postur SPBE dan rencana pengembangan untuk beberapa domain SPBE.
 3. Telah tersedianya beberapa layanan Administrasi Pemerintahan yang mendukung terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan Akuntabel.
- 2. Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi**

Pelayanan publik atau public service adalah perihal kemudahan yang diberikan sehubungan barang dan jasa kepada khalayak umum.

Dalam prakteknya di pemerintahan, negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Intinya, penyediaan pelayanan publik adalah bagaimana memudahkan publik dalam menyelesaikan sebuah urusan baik administrasi ataupun pelayanan barang dan jasa.

Capaian kinerja kelembagaan pemerintah dapat dilihat dari aspek peningkatan kualitas pelayanan publik. Kebijakan peningkatan kualitas penyelenggaraan

pelayanan publik sebagai upaya untuk memberikan pelayanan terpadu kepada masyarakat.

Selain itu, peningkatan kualitas layanan publik tidak terlepas dari berbagai bentuk inovasi dan Perkembangan Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK) Kaitannya dengan tata kelola pemerintahan, upaya mewujudkan pelayanan publik yang prima yang sesuai dengan perkembangan teknologi , informasi dan Komunikasi dapat dilihat dari Skor Indeks SPBE (Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang terus meningkat.

Pada tahun 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan target capaian untuk indicator ini sebesar 100 %, target ini setara dengan terdata 4 (empat) layanan publik, sedangkan realisasi pada tahun 2023 terdata 8 (delapan) layanan public yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi, atau jika di persentasikan setara dengan 200%. Dari target dan realisasi yang dicapai jika dipersentasekan mencapai 200% yaitu dari $200\%/100\% *100=200\%$; atau 8(Delapan) di bagi 4 (empat) dikali 100% sama dengan 200 %, capaian ini melampaui target yang ditetapkan, dan jika dibandingkan dengan capain tahun 2022, karena pada tahun 2023 terdata sudah ada 8 layanan public yang online dan terintegrasi yaitu yaitu PPID,SP4N Lapor,SPSE,JDIH,OSS,E-PPGBM,New siga BKKBN,SIKS-NG ; dari target 4 layanan yaitu SP4N Lapor,PPID, SPSE,JDIH; Dibawah ini table perbandingan target dan realisasi tahun 2022, 2023 dan masa akhir periode.

URAIAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		MASA AKHIR RPJMD
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET
Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100.00	100.00	100.00	200.00	100.00

3. **Persentase layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi;**

Layanan Administrasi Pemerintahan yang terintegrasi adalah suatu sistem layanan adanya saling keterkaitan antar sub sistem sehingga data dari satu sistem secara rutin dapat melintas, menuju atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain juga merupakan sebuah rangkaian proses untuk menghubungkan beberapa sistem komputerisasi dan software aplikasi, baik secara fisik maupun secara fungsional. Sistem terintegrasi akan menggabungkan komponen sub-sub sistem ke dalam satu sistem dan menjamin fungsi-fungsi dari sub sistem tersebut sebagai satu kesatuan sistem.

Pengintegrasian sistem informasi merupakan salah satu konsep kunci dari sistem Informasi Manajemen. Berbagai sistem dapat saling berhubungan satu dengan yang lain dengan berbagai cara yang sesuai dengan kebutuhannya. Aliran informasi diantara sistem sangat bermanfaat bila data dalam file suatu sistem diperlukan juga oleh sistem yang lainnya, atau output suatu sistem menjadi input bagi sistem lainnya. Secara manual juga dapat dicapai suatu integrasi tertentu, misalnya data dari satu bagian dibawa kebagian lain, dan oleh petugas administrasi data tersebut digabung dengan data dari sistem yang lain. Jadi kalau secara manual maka derajat integrasinya menjadi tinggi.

Layanan Administrasi Pemerintahan Pada tahun 2023 terdata sejumlah 164.

Dinas komunikasi dan Informatika menetapkan target capaian untuk indicator ini sebesar 26,67% atau setara dengan 44 layanan; dengan perhitungan yaitu $26.67\% * 164 = 44$, berarti harus ada 44 layanan Administrasi Pemerintahan yang terintegrasi tahun 2023. Sedangkan realisasi tahun 2023 terdata sebanyak 26 layanan Administrasi Pemerintahan yang terintegrasi, jumlah ini jika dipersentasikan setara dengan 15,85 % , sehingga Capaian kinerja untuk indicator ini pada tahun 2023 sebesar 54,44 % , (yaitu dari $15,85\% / 26,67\% * 100 = 54,44\%$)

Capaian ini melampaui target yang sudah ditetapkan.

Capaian ini lebih besar jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 15 % . Dan jika dibandingkan masa akhir periode sudah melampaui target

Dibawah ini perbandingan target dan capaian tahun 2022, 2023 dan masa akhir periode :

URAIAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		MASA AKHIR RPJMD
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET
Persentase layanan administrasi Pemerintahan yang terintegrasi	20,00	15,00	26,67	54,44	46,67

Jika dilihat pada table perbandingan diatas seolah- olah Capaian 54,44 % tahun 2023 sudah melampaui target masa akhir periode yang ternyata belum karena capaian 54,44% diatas adalah capaian dari target 26,67% dari 164 layanan.

2. Capaian Sasaran Meningkatnya Akses Informasi Publik

Sasaran strategi ke dua pada Dinas Komunikasi dan Informatika adalah “Meningkatnya Akses Informasi Publik “ yang terdiri dari 3 indikator yaitu seperti yang ada pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.4
Capaian Indikator Sasaran

Meningkatnya Akses Informasi Publik

N O	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENSTRA	REALISASI	%
1	3	3	4	5	6
2.	1 · Persentase kelompok informasi masyarakat yang menyebar informasi dan kebijakan Pemerintah Daerah	%	80.00	66,67	83,33
	2 · Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM)	%	100.00	120,00	120,00
	3 · Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100.00	20,93	20,93
	RATA-RATA				74,75

Rata-rata capaian sasaran strategi **Meningkatnya Akses Informasi Publik** adalah **74,75 %** dengan kategori **Sedang**, yang terdiri dari 3 indikator sbb:

1. Persentase kelompok informasi masyarakat yang menyebar informasi dan kebijakan Pemerintah Daerah.

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) adalah salah satu kelompok yang secara mandiri dan kreatif dibentuk oleh masyarakat guna melakukan pemberdayaan masyarakat terhadap akses informasi dan komunikasi, diharapkan kelompok ini sudah ada di 12 kecamatan yg ada di Kabupaten Manggarai.

Pada tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan target capaian untuk indicator ini sebesar 80 %, atau setara dengan terdapat 9 (Sembilan) Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang ada di Kabupaten Manggarai sampai dengan tahun 2023. akan tetapi realisasi sampai dengan tahun 2023 hanya terdapat delapan (8) Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang terbentuk jumlah ini setara dengan 66,67 %, sehingga capaian kinerja untuk indicator ini tahun 2023 sebesar 83,33 % yaitu perhitungannya: $66,67\% \div 80\% \times 100\%$ sama dengan 83,33 %. Capaian ini sama dengan capaian tahun 2022 karena sampai dengan tahun 2023 jumlah kelompok informasi masyarakat masih sama dengan tahun 2022 yaitu delapan (8) kelompok.

Dibawah ini table perbandingan target dan realisasi tahun 2022, 2023 dan masa akhir periode

URAIAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		MASA AKHIR RPJMD
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET
Persentase Kelompok Informasi Masyarakat yang menyebar informasi dan kebijakan Pemerintah daerah	75,00	83,33	80,00	83,33	87,50

2. **Persentase diseminasi dan layanan informasi Publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM).**

Pada tahun 2023 dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan target capaian indicator ini adalah 100 % dan realisasinya mencapai 120 % ,yaitu Dari target 5 (Website, LPPL RSPD,Antara Digital Media,PPID, SP4N Lapor) Diseminasi dan layanan informasi Publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi terdapat 6 layanan pada tahun 2023 yaitu Website, LPPL RSPD,Antara Digital Media,PPID, SP4N Lapor dan ditambah Media Sosial ; dengan perhitungan enam (6) dibagi lima (5) dikali seratus persen (100%) sama dengan seratus dua puluh persen (120%) .

Dan Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui komisi Informasi propinsi NTT mendapat piagam penghargaan atas keterbukaan informasi public.

URAIAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		MASA AKHIR RPJMD
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET
Persentase diseminasi dan layanan informasi public yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi	75,00	83,33	80,00	83,33	87,50

3. **Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo .**

Target capaian indicator ini pada tahun 2023 adalah 100 % dalam arti semua Perangkat daerah (43 PD) sudah terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo akan tetapi realisasi pada tahun 2023 hanya ada 9 Perangkat Daerah yaitu PPO, Dinkes, Kec. Satarmese, Kec. Satarmese Barat, kec. Langke Rembong, Pariwisata, Kec. Reok; Diskominfo, Kec. Ruteng sehingga capaian kinerja indicator ini pada tahun 2023 adalah sebesar 21 % dengan perhitungan sembilan (9) dibagi Empat Puluh Tiga (43) dikali Seratus persen (100 %) sama dengan dua puluh satu Persen (21 %), capaian ini melebihi capaian pada tahun 2022 sebesar 16,27 %

URAIAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		MASA AKHIR RPJMD
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET
Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Diskominfo	75,00	83,33	80,00	83,33	87,50

3. Capaian Sasaran Optimalnya Layanan Persandian dan Kualitas statistic Daerah

Sasaran strategi ke tiga pada Dinas Komunikasi dan Informatika adalah “ “ yang terdiri dari 3 indikator yaitu seperti yang ada pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.5
Capaian Indikator Sasaran

Optimalnya Layanan Persandian dan Kualitas Statistik Daerah

N O	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENSTR A	REALISA SI	%
1	3		4	6	7
3.	1 . Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi	%	100.00	100,00	100,00
	2 . Persentase sistem data statistik yang terintegrasi	%	100.00	6,98	6,98
	3 . Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100.00	100,00	100,00
	4 . Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100.00	100,00	100,00
	RATA-RATA				76,74

Rata-rata capaian dari sasaran strategi Optimalnya Layanan Persandian dan Kualitas Statistik Daerah adalah 76,74 % yang terdiri dari :

1. Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi.

Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan target capaian indicator ini pada tahun 2023 adalah 100 % dan realisasinya mencapai 100% dalam arti semua Perangkat Daerah sudah menggunakan sandi dalam berkomunikasi , hal ini dilihat dari semua Perangkat Daerah sudah memiliki Mail Manggaraikab.go.id.

Capaian ini sudah mencapai target tahun 2023, jika dibandingkan dengan masa akhir periode capaian ini juga sudah mencapai target

Dibawah ini table perbandingan target dan capaian tahun 2022,2023 dan masa akhir periode

URAIAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		MASA AKHIR RPJMD
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET
Persentase PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

2. Persentase sistem data statistik yang terintegrasi;

Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan Target Capaian dari indicator ini pada tahun 2023 sebesar 100% ; akan tetapi realisasinya masih 6,98% karena system data statistic yang ada di kabupaten manggarai belum semuanya terintegrasi dengan aplikasi yang lain yang ada di setiap Perangkat daerah, hanya ada 3 (tiga) Perangkat daerah yg sudah terintegrasi ,Diharapkan kedepannya sudah bisa terintegrasi semua. Walaupun demikian capaian ini sangat bagus dibandingkan dengan tahun 2022 yang belum ada realisasinya. Dan capaian ini jika di bandingkan dengan masa akhir periode masih belum mencapai target

Dibawah ini table perbandingan target dan capaian kinerja tahun 2022,2023 dan masa akhir periode.

URAIAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		MASA AKHIR RPJMD
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET
Persentase sistim data statistic yang terintegrasi	100,00	0,00	100,00	6,98	100,00

3. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah;

Pada tahun 2023 ditetapkan target capaian untuk indicator ini sebesar 100 % dan realisasi nya mencapai 100 % dengan penjelasan bahwa semua perangkat daerah (43 PD) sudah menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah hal ini dapat dilihat dari pendistribusian buku Manggarai dalam Angka kesemua perangkat daerah, dengan demikian diharapkan semua PD menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan.

Dibawah ini table perbandingan target dan capaian tahun 2022,2023 dan masa akhir periode

URAIAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		MASA AKHIR RPJMD
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET
Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Terlihat pada table diatas realisasi tahun 2023 dan masa akhir periode sudah mencapai target

4. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah;

Pada tahun 2023 ditetapkan target capaian untuk indikator ini sebesar 100 % dan realisasinya mencapai 100 % dengan penjelasan bahwa semua perangkat daerah (43 PD) sudah menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah hal ini dapat dilihat dari pendistribusian buku Manggarai dalam Angka kesemua perangkat daerah, dengan demikian diharapkan semua PD menggunakan data statistik yang dalam buku tersebut.

Dibawah ini table perbandingan target dan capaian tahun 2022,2023 dan masa akhir periode

URAIAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		MASA AKHIR RPJMD
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET
Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah;	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Terlihat pada table diatas realisasi tahun 2023 dan masa akhir periode sudah mencapai target.

Untuk mencapai target indikator dari sepuluh (10) IKK yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kami dengan sangat rendah hati mengharapkan perhatian dan dukungan Pemerintah untuk mendukung Kami dari segi SDM dan Infra struktur untuk mencapai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan demikian dapat semakin meningkatkan nilai indeks SPBE Kabupaten Manggarai yang juga menjadi IKU Pemerintah kabupaten Manggarai.

B. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Pencapaian kinerja seperti yang telah diuraikan di atas, disamping karena didukung berbagai program strategis juga didukung dengan sumber daya lainnya. Salah satu sumber daya yang sangat besar perannya dalam pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Sumber Daya Manusia Aparatur. SDM Aparatur PNS Dinas Komunikasi dan Informatika berjumlah 21 orang, yang

terdiri dari laki-laki 12 orang (57%) dan perempuan 9 orang (43%). Adapun komposisi PNS Dinas Komunikasi dan Informatika menurut tingkat pendidikan dan golongan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah PNS menurut Pendidikan sebagai berikut :

Tabel 3.6
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
Tahun 2023

No.	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan				Jumlah
		S-2	S-1	D-3	SLTA	
1.	Kepala Dinas	-	1	-	-	1
2.	Sekretaris	-	1	-	-	1
3.	Kepala Bidang	1	1	1	-	3
4.	Kepala Sub Bagian		1	-	-	1
5.	Pejabat Fungsional	-	4	1	1	6
6.	Staf		3	2	4	9
Total		-	13	5	4	21

Berdasarkan table tersebut di atas, komposisi Pegawai (PNS) Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023, didominasi oleh tingkat pendidikan S-1/ Akta IV yang mencapai 61,90%.

- b. Jumlah PNS menurut Golongan sebagai berikut:

Tabel 3.7
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan
Tahun 2023

No	Jabatan	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Kepala Dinas	-	-	-	1	1
2.	Sekretaris	-	-		1	1
3	Kepala Bidang	-	-	-	3	3
4.	Kepala Sub Bagian	-	-	1	-	1
5.	Pejabat Fungsional			7		7
6.	Staf	-	5	3	-	8
JUMLAH		-	5	11	5	21

Komposisi Pegawai (PNS) Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023 menurut golongan, didominasi oleh PNS Golongan III sebesar 52,38%.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN ANGGARAN 2023.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai pada Tahun 2023 melaksanakan 5 program dan 11 kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.777.616.652,- realisasi sebesar Rp. 2.561.245.150,- atau sebesar 92,21 %.

Tabel 1.4.2
Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Belanja Operasi	2,753,816,652	2,539,245,150	92.21
D	Belanja Pegawai	1,863,511,716	1,679,714,992	90.14
i	Belanja Barang dan Jasa	890,304,936	859,530,158	96.54
n				
a	Belanja Modal	23,800,000	22,000,000	92.44
s	Belanja modal Peralatan dan Mesin	23,800,000	22,000,000	92.44
	Jumlah Belanja	2,777,616,652	2,561,245,150	92.21

PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH.

Pendapatan daerah diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari pendapatan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Realisasi pendapatan Dinas Komunikasi dan Informatika menurut jenis pendapatan:

Tabel 3.9

Tabel Realisasi Pendapatan tahun 202 3

NO	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi	217.395.288;	332.251.447;	153
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Terpisahkan (RSPD)	15,000,000;	8.960.000;	60
	Jumlah	232.395.288;	341.211.447;	147

Target dan realisasi anggaran berdasarkan sasaran strategis

Tabel 3.10

Realisasi APBD Tahun 2023 berdasarkan 3 (tiga) Sasaran strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Optimalnya Integrasi Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik	86.940.000;	86.590.000;	99.60
2	Meningkatnya Akses Informasi Publik	451.567.240;	425.738.572;	94,28
3	Optimalnya Layanan Persandian dan Kualitas Statistik Daerah	27.907.000;	26.907.000	96,41

Efisiensi Penggunaan Anggaran.

Tabel 3.11

Efisiensi Penggunaan Anggaran

NO	SASARAN STRATEGIS	% RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% REALISASI ANGGARAN	KET.
(1)		(2)		(3)	(4)	
1	Optimalnya Integrasi Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik	123,70 %	86.940.000;	86.590.000;	99.60	EFISIEN
2	Meningkatnya Akses Informasi Publik	74,75 %	451.567.240;	425.738.572;	94,28	TIDAK EFISIEN
3	Optimalnya Layanan Persandian dan Kualitas Statistik Daerah	76,74 %	27.907.000;	26.907.000	96,41	TIDAK EFISIEN
	TOTAL	91,73 %			96,76 %	EFISIEN

A. Dari tabel diatas dapat dijelaskan sasaran strategis “ **Optimalnya Integrasi Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik , Meningkatkan Akses Informasi Publik dan Optimalnya Layanan Persandian dan Kualitas Statistik Daerah**” dinyatakan **efisien** karena Realisasi Indikator Kinerja dan realisasi Anggaran diatas 90,00% , hal ini terjadi karena beberapa faktor yaitu :

Faktor- factor yang mempengaruhi

1. Meningkatnya nilai indeks SPBE secara signifikan
2. Terlaksananya kegiatan pendataan jumlah layanan public dan layanan administrasi pemerintahan di setiap Perangkat Daerah

3. Pemenuhan variabel pada domain kebijakan internal SPBE sudah mulai Nampak walaupun belum optimal.
4. Adanya peningkatan tata kelola dan ekosistem e-Government dalam rangka mewujudkan digitalisasi tata kelola pemerintahan.

Disamping beberapa factor yang menunjang peningkatan kinerja diatas masih ada juga factor yang perlu dan masih harus ditingkatkan yaitu:

1. Belum adanya jaringan terpusat yang menghubungkan setiap perangkat daerah
2. Belum adanya data center (pusat data) yang terintegrasi
3. Masih banyaknya aplikasi yang belum terintegrasi
4. Masih banyak wilayah yang belum terjangkau layanan telekomunikasi
5. Belum maksimalnya Pemberdayaan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat)
6. Belum maksimalnya jangkauan siaran LPPL RSPD
7. Kurangnya dokumen data statistik sektoral daerah yang terintegrasi

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN KINERJA TAHUN 2023

Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Manggarai merupakan instansi Pemerintah yang diberikan tugas, tanggung jawab dan amanah untuk mewujudkan pelayanan komunikasi dan informasi di Kabupaten Manggarai. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Komunikasi dan Informatika berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Bupati, maupun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan dengan persentase capaian kinerja sasaran 91,73 % dengan kategori **Sangat Tinggi**, Capaian kinerja sasaran ini jika di bandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 11,73 % , akan tetapi masih ada beberapa indikator yang belum mencapai target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, indikator kinerja yang belum memenuhi target, ke depannya akan menjadi tugas dan Perhatian Dinas Komunikasi dan Informatika agar lebih bagus dan dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

B. HAMBATAN YANG DIHADAPI DAN STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

MASALAH-MASALAH

1. Belum adanya Diklat bagi pejabat yang menduduki jabatan di bidang Persandian dengan bidang Komunikasi dan Informatika
2. Masih kurangnya saran prasarana dibidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik

3. Belum adanya jaringan terpusat yang menghubungkan setiap perangkat daerah
4. Perlu peningkatan tata kelola dan ekosistem e-Government dalam rangka mewujudkan digitalisasi tata kelola pemerintahan
5. belum adanya data center (pusat data) yang terintegrasi
6. Masih banyaknya aplikasi yang belum terintegrasi
7. Masih banyak wilayah yang belum terjangkau layanan telekomunikasi
8. Belum maksimalnya Pemberdayaan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat)
9. Belum maksimalnya jangkauan siaran LPPL RSPD
10. Kurangnya dokumen data statistik sektoral daerah yang terintegrasi

C. LANGKAH ANTISIPATIF YANG AKAN DIAMBIL TAHUN BERIKUTNYA

Langkah-Langkah antisipatif yang dilakukan untuk mengantisipasi hambatan/kendala tersebut :

1. Mengalokasikan anggaran khusus untuk Diklat Struktural dan Fungsional Aparatur.
2. Mengusulkan untuk pengadaan peralatan gedung kantor dan pengadaan kendaraan dinas operasional. (kendaraanDinas roda empat dan kendaraan dinas roda dua)
3. Membuat jaringan terpusat yang menghubungkan setiap perangkat daerah
4. Mengoptimalkan Pemenuhan variabel pada domain kebijakan internal SPBE
5. Meningkatkan tata kelola dan ekosistem e-Government dalam rangka mewujudkan digitalisasi tata kelola pemerintahan
6. Membuat data center (pusat data) yang terintegrasi
7. Semua aplikasi terintegrasi
8. Memastikan seluruh wilayah terjangkau layanan telekomunikasi
9. Memaksimalkan Pemberdayaan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat)
10. Memaksimalkan jangkauan siaran LPPL RSPD
11. Membuat dokumen data statistik sektoral daerah yang terintegrasi

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2023 ini dibuat untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertanggungjawaban, evaluasi dan acuan bagi pengambilan keputusan selanjutnya.

Ruteng, 24 Januari 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MANGGARAI,

HERIBERTUS JELAMU, SH
PEMBINA
NIP. 19670316 19803 1 005